

GARUT ERA KEPEMIMPINAN BUPATI R.A.A. SOERIA KERTALEGAWA (1915-1929)

Maman Darmansyah

Universitas Pamulang

email: dosen01129@unpam.ac.id

Paper Accepted: 21 Juni 2018
Paper Reviewed: 7-15 Juli 2018
Paper Edited: 17-24 Juli 2018
Paper Approved: 25 Juli 2018

ABSTRAK

Garut merupakan nama pengganti dari Kabupaten Limbangan, dan berdiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda atas usul bupati Aria Wira Tanu Datar VIII. R.A.A. Soeria Kertalegawa merupakan bupati kedua Kabupaten Garut setelah Aria Wira Tanu Datar VIII. Pada masa kepemimpinannya, Garut mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama dalam bidang pariwisata, akan tetapi disisi lain Garut juga mengalami keterpurukan, khususnya dalam bidang politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang berdirinya Kabupaten Garut pada tahun 1913 dan merekonstruksi kondisi Garut pada masa pemerintahan R.A.A. Soeria Kertalegawa pada tahun 1915 sampai tahun 1929. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah (MPS) melalui tahapan *Heuristik, Kritik, Interpretasi*, dan *Historiografi*, dengan pendekatan multidimensional; politik, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Berdasarkan hasil penelitian, Garut sebelumnya adalah kabupaten Limbangan yang berdiri pada 1 Juli 1913, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 60 tertanggal 7 Mei 1913. Kota Garut pada saat itu meliputi *tiga* desa, yaitu Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Magarwati. Sedangkan Kabupaten Garut meliputi distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk. R.A.A. Soeria Kertalegawa adalah bupati kedua Garut yang memerintah dari tahun 1915 sampai dengan tahun 1929. Pada masa pemerintahannya, Garut mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata, akan tetapi juga mengalami kekacauan politik yang diakibatkan oleh munculnya radikalisme bangsa pribumi seperti peristiwa Cimareme (yang dirasa sangat pahit bagi rakyat dan pemerintah). Begitupun dalam bidang ekonomi yang diakibatkan oleh kemarau panjang dan krisis global akibat Perang Dunia I. Masyarakat Garut terdiri dari penduduk pribumi, eropa dan timur jauh. Penduduk pribumi digolongkan menjadi dua golongan besar dalam stratifikasi sosial, yaitu bangsawan dan rakyat jelata. Sebagian besar mereka beragama Islam yang dalam pengkajiannya sangat dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda, hanya ajaran yang bersifat ukhrowi saja. Apabila ada *Ajengan* (Kyai/ Ulama) yang melanggar ketentuan maka mereka mendapatkan hukuman dari pemerintah pribumi itu sendiri atas persetujuan pemerintah pusat.

Kata Kunci : Garut; Kepemimpinan Bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Staatsblad No. 60 tahun 1913 bahwa Garut resmi menjadi bagian dari kabupaten-kabupaten di Priangan (*Preangaer Regentschappen*) dengan ibukota Garut. Namun peletakan batu pertama pembangunan sarana prasarana ibukota, seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun sudah dimulai hampir satu abad sebelumnya, yaitu pada 5 September 1813.

Dalam perkembangannya sebelum menjadi *regentschap*, Garut merupakan ibukota Limbangan, yang pada mulanya beribukota di Suci. Oleh karena kondisi geografis Suci sudah tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah ibukota kabupaten, letak dan daerahnya sempit dan tidak memungkinkan mengadakan perluasan kota, maka bupati Adipati Adiwijaya (1813-1831) dengan membentuk panitia pencarian tempat yang cocok untuk ibukota kabupaten. Mereka menemukan tempat di sebelah barat Suci sekitar 5 km yang layak untuk dijadikan ibukota kabupaten. Tempat inilah yang kemudian hari ini kita kenal dengan nama "Garut".

Pemindahan ibukota Limbangan dari Suci ke Garut terjadi sekitar tahun 1821, sedangkan penggantian nama Limbangan menjadi Garut berlangsung pada tanggal 1 Juli 1913, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 60 tertanggal 7 Mei 1913. Kota Garut pada saat itu meliputi *tiga* desa, yaitu Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Magarwati. Sedangkan Kabupaten Garut meliputi distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbunglang, dan Pameungpek (Kunto Sofyanto, 2001:11). Perubahan ini terjadi pada masa bupati Wira Tanu Datar VIII.

R.A.A. Soeria Kertalegawa adalah bupati Garut *kedua*, setelah Wira Tanu Datar VIII. Dari garis ayah, ia adalah cucu H. Muhammad Moesa *hoofdpanghulu* Garut yang terkenal akrab dengan orang Belanda. Ia memulai karirnya dari tahun 1892 sebagai juru tulis keasistenan Sumedang, kemudian sebagai *mantri ulu-ulu* di Cikalong (Cianjur), Ciheulang (Sukabumi), Bandung dan Garut, asisten wedana klas 2 Sidinghilir (Sukapura), asisten wedana Conggeang (Sumedang) wedana Panyeredan, Singaparna, dan kota Bandung terakhir menjadi patih Bandung. Dengan beslit tertanggal 1 Juli 1915 No. 6 dia diangkat menjadi Bupati Garut.

Pada masa R.A.A. Soeria Kertalegawa di tahun 1915, penduduk Garut ±510.000 jiwa,

terdiri dari 508.280 jiwa penduduk pribumi, 740 jiwa penduduk bangsa Eropa, dan 980 jiwa penduduk Timur Jauh, dengan luas wilayah 3.065 km².

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas persoalan di atas dengan judul "**Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929)**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dalam pelacakan atas peristiwa-peristiwa serta penjabaran permasalahan tersebut akan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimana gambaran umum Garut menjelang tahun 1915?
2. Bagaimana kondisi Garut periode kepemimpinan bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu kesatuan yang sinkron dengan rumusan masalah diatas, yaitu;

1. Mengetahui gambaran umum Garut menjelang tahun 1925
2. Mengetahui kondisi Garut periode kepemimpinan bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929)

METODE PENELITIAN

Dalam langkah-langkah penelitian diperlukan adanya sebuah kajian studi sejarah, maka dalam penelitian ini digunakan metode sejarah sebagai tahapan penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memferivikasi, serta mensistensiskan bukti-bukti untuk menegakan fakta-fakta dan untuk memperoleh kesimpulan yang kuat (E. Kosim, 1984; 32). Oleh karena itu, dalam penelitiannya pun harus ditempuh dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Ada 4 tahapan dalam metode penelitian sejarah, yaitu;

1. Heuristik

Tahapan heuristik merupakan tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. Pada tahapan ini, penulis lebih banyak mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang tergolong primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip pemerintahan Hindia Belanda yang terdapat di

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sumber sekunder berupa buku yang terdapat di perpustakaan-penulis kunjungi dan koleksi perorangan.

a. Arsip

Sumber ini diantara adalah; Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat), Regeeringalmanak (tahun 1916-1929), Conduitestaat van R.A.A. Soeria kertalegawa (tahun 1917, 1918, 1924, 1926, 1928), Soerat Asal oesoel (berbahasa Indonesia dengan ejaan dulu, memuat asal usul R.A.A. Soeria Kertalegawa ketika menjadi Patih Singaparna), Surat catatan pekerjaan yang telah dijalani (berbahasa Indonesia dengan ejaan dulu, menerangkan perjalanan karir R.A.A. Soeria Kertalegawa hingga menjadi bupati), Staatsblad (buku berbahasa Belanda, menerangkan putusan Gubernur Jenderal tentang suatu hal).

b. Foto

Sumber dokumentasi selanjutnya diantaranya dalam bentuk foto, adalah sebagai berikut; foto R.A.A Soeria Kertalegawa, foto R.A.A Soeria Kertalegawa beserta istri dan anak pertama beserta istri, foto Moehammad Moesa (kakek R.A.A Soeria Kertalegawa, foto Wira Tanu Datar VIII, foto Lasminingrat (bibi dari ayah), foto acara khitanan Aom Trenggana dan Agan Kasom beserta keluarga R.A.A Soeria Kertalegawa (koleksi berbagai sumber Garut Kota Intan), foto Situ Bagendit (The Garoet-Expres and Tourist Guide Geillustreed Weekblad, N.V.A.C. Nix & Co, edisi 1 Desember 1922, hal. 10, koleksi berbagai sumber Garut Kota Intan), foto Hotel Vila Dolce (The Garoet-Expres and Tourist Guide Geillustreed Weekblad, N.V.A.C. Nix & Co, edisi 22 Desember 1922, hal. 29, koleksi berbagai sumber Garut Kota Intan), foto Adu Domba (The Garoet-Expres and Tourist Guide Geillustreed Weekblad, N.V.A.C. Nix & Co, edisi 3 Desember 1922, hal. 21, koleksi berbagai sumber Garut Kota Intan), foto Hotel Papandajan (The Garoet-Expres and Tourist Guide Geillustreed Weekblad, N.V.A.C. Nix & Co, edisi 8 Desember 1922, hal. 19, koleksi berbagai sumber Garut Kota Intan), foto Bioskop Julian (tahun 1918).

Untuk menunjang sumber primer diatas, telah disebutkan tadi bahwa penulis menggunakan sumber sekunder sebagai rujukan yaitu buku-buku yang terdapat diperpustakaan dan koleksi perorangan, diantaranya; 1) Sulaeman Anggapraja, 1977, *Sejarah Garut dari Masa ke Masa*, Pemda Garut, 2) Sulaeman Anggapraja, 1983, *Sejarah Garut dari Masa ke*

Masa dan Hari Jadi Garut, Pemda Garut, 3) Nina H Lubis, 1998, *Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942)*, Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 4) Chusnul Hajati, 1990, *Pertempuran Cimareme, Tahun 1919; Perlawanan H. Hasan terhadap peraturan Pembelian Padi*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5) Pemerintahan Jawa Barat, 1991, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Barat*, 6) Robert van Niel, 1984, *Munculnya Elit Modern Indonesia, Bandung, Pustaka Jaya*, 7) Bayu Surianingrat, 1981, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia; Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta, Dewaruci Press.

c. Wawancara

Sumber lisan yang telah penulis dapatkan dengan cara melalui wawancara adalah wawancara dengan bapak Daong M. Zulkarnaen, usia 64 tahun (cucu R.A.A Soeria Kertalegawa).

2. Kritik

Sumber-sumber yang terkumpul pada tahap heuristik, selanjutnya dilakukan penilaian untuk menguji otentisitas dan kredibilitasnya, melalui kritik interen dan eksteren (Dudung Abdurrohmam, 1999; 85). Kritik eksteren meliputi masalah otentisitas sumber yang akan diteliti dan diuji melalui pengujian terhadap segi-segi fisik sumber, apakah sumber tersebut asli atau tidak. Hal tersebut dilakukan penulis melalui pengujian terhadap bahan yang digunakan yaitu, berupa arsip seperti; jenis tinta, kertas, tulisan tangan, ejaan yang dipakai dan lain-lain. Sedang kritik interen meliputi masalah kredibilitas dengan mengadakan penilaian terhadap sumber, baik tertulis maupun lisan, dengan mendekati keadaan sumber yang dapat memberikan informasi kebenaran dan keterangan yang akura dan terperinci mengenai hal-hal yang diteliti. Dari proses kritik ini diharapkan data-data yang telah dikumpulkan dapat diseleksi menjadi fakta (E. Kosim, 1984; 85).

Untuk sumber lisan, dilakukan melalui seleksi pengkisah yang menyangkut dua hal, yaitu usia dan kesehatan mental (Reiza D. Putera, 2006; 48). Seleksi usia dilakukan untuk mengetahui kesezamanan pengkisah dengan peristiwa yang akan digali sejarahnya dan keehatan mental didasarkan pada kemampuan pengkisah untuk menyampaikan informasi tentang permasalahan yang penulis tanyakan. Selain itu, seleksi pengkisah dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan terhadap tokoh yang dijadikan fokus dalam penelitian.

3. Interpretasi

Setelah pengujian dan analisis data dilakukan, maka fakta-fakta yang diperoleh perlu ditafsirkan melalui tahapan ketiga dari metode penelitian sejarah, yaitu Interpretasi (*penafsiran*) atau sintesis, yaitu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, atau dengan perkataan lain, berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh jejak-jejak dengan berusaha membayangkan bagaimana masa lampau itu (E. Kosim, 1984; 36).

Sejarah mencakup segala aktifitas manusia masa lampau dan akan diketahui apabila dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan historis, sehingga menghasilkan eksplanasi sejarah, yaitu berupa uraian dalam sebuah cerita yang disusun penulis. Artinya sejarah merupakan suatu konstruk yang disusun oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang koheren antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam penulisan sejarah unsur subjektif penulis akan mempengaruhi, yang memuat sifat-sifatnya, gaya bahasa, struktur pemikiran, pandangan, dan lain sebagainya (Sartono Kartodirjo, 1992; 14).

Setelah diperoleh eksplanasi sejarah, juga diperlukan kerangka teoritis yang berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, serta memberi arahan dalam pelacakan data dan menentukan jenis pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sebagai ilmu bantu, diharapkan dapat memberikan pilihan teori yang sesuai dengan topik penelitian ini.

Mengingat penelitian ini mengangkat tokoh pemimpin, maka akan berkaitan dengan peran seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Menurut Marx Weber kepemimpinan secara umum dibedakan kedalam *tiga* jenis otoritas, yaitu; otoritas kharismatik, otoritas tradisional, dan otoritas legal-rasional (Sartono Kartodirjo, 1992; 50). Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan multidimensional guna merekonstruksi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Garut masa kepemimpinan R.A.A Soeria Kertalegawa (1915-1929).

4. Historiografi

Tahapan atau kegiatan akhir dari metode sejarah adalah *Historiografi* (penulisan sejarah). Pada tahapan ini, semua data yang sudah dikumpulkan, dikritik, dan ditafsirkan, kemudian ditulis menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Dengan menggunakan jenis penulisan deskriptif analisis, penulis berharap dapat mengungkapkan fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi (Lois Gottsclak, 1983; 29). Hasil penelitian disajikan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Garut Tahun 1915

Latar Belakang *Regentschap* Garut

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa titik tolak sejarah Garut adalah Kerajaan Sunda masa pemerintahan Prabu Siliwangi sebagai leluhur bupati-bupati di Jawa Barat. Pada masa itu, Garut dikenal dengan nama Galih Pakuan, kemudian pada masa pemerintahan Islam berubah menjadi Limbangan, dan terakhir pada masa pemerintahan Hindia Belanda berubah menjadi Garut.

Perlu untuk diketahui, bahwa pada masa pemerintahan Pajajaran (Prabu Siliwangi), wilayah Garut terdiri dari Galih Pakuan, Cangkuang, Sudalarang, Mandala Puntang, Kadangwesi, Batuwangi dan Sancang. Akan tetapi ketika Cirebon yang semula merupakan wilayah kekuasaan Pajajaran melepaskan diri dipimpin oleh Sunan Gunung Djati (cucu Prabu Siliwangi dari Dewi Rara Santang), maka posisi Kerajaan pajajaran terancam dan satu per satu wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan Cirebon. Meskipun demikian Kerajaan Pajajaran tetap eksis menjadi kerajaan kecil dan akhirnya dapat ditaklukan oleh Kesultanan Banten bentukan Cirebon. Disaat Kerajaan Pajajaran runtuh, Cirebon membentuk pemerintahan agama, yang secara umum dibagi kedalam empat kesultanan; Kesultanan Pajajaran (Pangeran Cakrabuana), Kesultanan Jayakarta (Faletehan), Kesultanan Banten (Sultan Maulana Hasanudin), Kesultanan Tegal (Pangeran Raja Sengara). Islamisasi Garut sendiri dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana (Kean Santang) (Sulaeman Anggapraja, 1977).

Pada masa kekuasaan Islam, di Garut muncul beberapa tempat yang berbau Islam, seperti pada Tabel 1; Daftar Nama Tempat di Garut yang munculnya pada Masa Pemerintahan Islam (Cirebon).

Tabel 1 Daftar Nama di Garut yang Munculnya pada Masa Pemerintahan Islam (Cirebon)

No	Nama	Keterangan
1	Limbangan	Dari seimbang maksudnya kesunanan Galuh
2	Goa Godok	Goa tempat Kean Santang mengajarkan Islam, berupa pesantren
3	Salam Nunggal	Tempat penyebaran Islam pertama
4	Bojong Salam	Tempat diselamatkan
5	Suci	Pusat penyebaran Islam di Garut oleh Kean Santang

Setelah runtuh karena ditaklukan Banten wilayah Kerajaan Pajajaran hampir meliputi seluruh Propinsi Jawa Barat sekarang, ditambah dengan Jawa Tengah, terbagi kedalam 4 wilayah kekuasaan, yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang (yang semula merupakan bawahan Kerajaan Sunda) dan Kerajaan Galuh (Pajajaran).

Kekuasaan selanjutnya adalah Mataram di tahun 1620 setelah menguasai Sumedanglarang dan menaklukan Cirebon dengan cara yang cukup halus, yaitu melalui jalur perkawinan antara Sultan Agung Mataram dengan putri Ratu Sakluh (kakak perempuan Panembahan Ratu I Cirebon). Mataram terus memperluas wilayahnya hingga hampir semua wilayah Priangan.

Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian dengan VOC tanggal 19-20 Oktober 1677 dan 5 Oktober 1705. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Mataram menyerahkan wilayah Priangan Timur kepada VOC, sedangkan dalam perjanjian kedua Mataram menyerahkan wilayah Priangan Tengah dan Barat kepada VOC, kemudian diangkatlah Pangeran Cirebon sebagai pengawas bupati-bupati Priangan. Kemudian berdasarkan keputusan Komandeur Jacob Couper tanggal 15 November 1684, Kabupaten Limbangan karena penduduknya hanya 200 keluarga, maka digabungkan dengan Kabupaten Sumedang, selanjutnya Limbangan mempunyai kedudukan sebagai *distrik (kawedanaan)*

Pada masa pemerintahan-penyelang (*interrgnum*) Inggris (1811-1816) Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris, memperkenalkan istilah *karesidenan* yang dipimpin oleh seorang *residen*.

Setelah kembalinya pemerintahan Inggris kepada Hindia Belanda atas negeri jajahan, Limbangan mengalami beberapa perubahan, baik

dari struktur pemerintahan, maupun wilayah kekuasaan.

1). Pemandahan Ibukota Limbangan dari Suci ke Garut (1821). Kondisi geografis Suci yang tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah ibukota kabupaten, maka bupati Adipati Adiwijaya (1813-1831) dengan segera membentuk panitia pencarian tempat yang cocok untuk ibukota kabupaten. Kemudian ditemukanlah tempat di sebelah barat Suci (sekitar 5 km) yang layak untuk dijadikan ibukota kabupaten, tempat itulah yang dikenal dengan "Garut". Nama Garut berasal dari kata *kakarut* (Sunda), artinya tergores.

2). Perubahan Susunan Pegawai Pemerintahan (1821). Kabupaten Sukapura dibubarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen tahun 1821 dengan alasan daerahnya luas tapi tidak memberikan kontribusi terhadap keuangan pemerintah dan wilayah bekas kabupaten tersebut dibagikan kedalam 3 kabupaten lainnya yang berdekatan, yaitu Limbangan (Garut), Sumedang, dan Cianjur.

3). Penggantian Nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 60, tertanggal 7 Mei 1913.

Letak Geografis dan Kondisi Demografis

Garut merupakan nama pengganti dari Kabupaten Limbangan, dan berada di wilayah Priangan Timur (*Oost-Priangan*). Ibukota kabupaten terletak di Garut Kota yang dahulu dikenal daerah Suci. Luas wilayah Garut adalah 3.065 km², dan dibagi kedalam beberapa wilayah administratif, yaitu; 3 kontrolir, 9 distrik, dan 29 onderdistrik. Sebagai gambaran bisa dilihat pada Tabel 2, Wilayah Garut Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal, 7 Mei 1913, No. 60, lembaran Negara, No. 356, terhitung 1 Juli 1913.

Tabel 2 Wilayah Garut Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal 7 Mei 1913, No. 60, lembaran Negara, No. 356 terhitung 1 Juli 1913

Kontrolir	Distrik	Onderdistrik
Garut	Garut	Garut
		Ciparay
		Sadang
		Wanaraja

	Bayongbong	Bayongbong
		Cilawu
		Cisurupan
Cibatu	Cibatu	Cibatu
		Nagkapait
		Malangbong
		Lewo
	Tarogong	Tarogong
		Bojongsalam
		Samarang
	Leles	Leles
		Kadungora
	Balubur Limbangan	Balubur Limbangan
Cianten		
Cikajang	Cikajang	Cikajang
		Banjarwangi
		Singajaya
	Bungbulang	Bungbulang
		Nangkaruka
		Pakenjeng

Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut; sbelah utara berbatasan dengan kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Secara umum, iklim di wilayah Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*).

Sejak dasawarsa pertama abad ke-19 (tahun 1915), Garut sudah tidak hanya didiami oleh penduduk pribumi, tetapi juga didiami oleh bangsa lain, khususnya Eropa dan China. Adapun secara jumlah, penduduk Garut dapat dipetakan sebagai berikut; secara keseluruhan jumlah penduduk adalah 510.000 jiwa, terdiri atas 508.280 penduduk pribumi, 740 penduduk Eropa, dan 980 penduduk Timur Jauh (Martinus Nnijhoff, 1917; 740).

Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A Soeria Kertalegawa (1915-1929)

A. Latar Belakang R.A.A Soeria Kertalegawa

R.A.A Soeria Kertalegawa merupakan anak *kedua* dari pasangan Soeria Nata Legawa (atau juga dikenal dengan nama Kartawinata) dengan Radja Retna. Ia bersaudara kandung dengan Soeria Tanu Ningrat (Wedana Cicalengka), Soeria Kerta Prawita (Wedana Bandung), Pandji Soeria Pamekas (Patih Sukabumi), Modjaningrat, Hamisah, dan Abas Soeria Nata Atmadja (Bupati Serang). Berdasarkan silsilah keluarga, ia memiliki hubungan dengan leluhur Cianjur, Sumedang, dan Panjalu. Ayahnya diangkat menjadi Patih Sumedang (29 April 1883) dan Patih Sukabumi (18 Juli 1892). R.A.A Soeria Kertalegawa merupakan cucu pasangan Moehammad Moesa

(*hoofdpanghulu* Garut keturunan Panjalu) dan Perbata Mirah (keturunan Sumedang), kakek dan nenek dari ayahnya, yaitu Soeria Nata Legawa.

R.A.A Soeria Kertalegawa memiliki hubungan saudara dengan bupati Garut pertama, yaitu Aria Wira Tanu Datar VIII yang merupakan suami dari saudara kandung ayahnya, yaitu Lasminingrat. Sedangkan Aria Wira Tanu Datar VIII sendiri merupakan saudara dari ibunya. Kakek dari ibu R.A.A Soeria Kertalegawa adalah Bupati Limbangan (Garut) terdahulu, yaitu Soeria Nata Koesoemah yang juga dikenal dengan gelar Aria Wira Tanu Datar VII (1836-1871) dan neneknya, Siti Rukiah, dari garis ibunya merupakan keturunan petinggi Cianjur dan ia mempunyai hubungan dengan Bupati Bogor (R. Tumenggung A. Soeridjanagara), Bupati Serang (R. Tumenggung A. Prawirakoesoemah), Bupati Karawang (R.A.A Soeridaningrat, dan Bupati Rangkasbitung (R.A.A Soerianataningrat).

Karir R.A.A Soeria Kertalegawa sebelum menjadi Bupati; juru tulis kantor keasistenan Sumedang (1892), *mantri ulu-ulu* Cikalong (Cianjur), Ciheulang (Sukabumi)), Bandung dan Garut, asisten wedana kelas 2 Sodonghilir (Sukapura), asisten wedana Conggeang (Sumedang), wedana Panyeredan, Singaparna, dan Kota Bandung, terakhir menjadi Patih Bandung. Dengan beslit tertanggal 1 Juli 1915, No. 6, dia diangkat menjadi Bupati Garut.

Pada tanggal 10 Desember 1894, ia menikah dengan Nyi Raden Adjeng Sedjamirah, putri Rd. Demang Kastadikoesoemah (mantan Patih Sukabumi). Dari pernikahannya, ia dikaruniai *tiga* orang anak, yaitu Rd. Moehammad Moesa Kertalegawa (Bupati Garut setelahnya dan pendiri negara Pasundan) (lahir 26 Oktober 1896, Nyi Raden Ajeng Siti Hadidjah (lahir 11 Juli 1898), dan Rd. Doelkarnaen/ Zulkarnaen (Bupati Lebak) (lahir 5 Desember 1906).

B. Kondisi Politik Garut

Awal pemerintahan R.A.A Soeria Kertalegawa merupakan masa merajalelanya radikalisme rakyat pribumi secara menyeluruh dalam rangka memerangi kolonial Belanda yang dianggap sebagai kaum kafir dan harus disingkirkan dari negeri yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Hal ini mengakibatkan munculnya perlawanan-perlawanan diberbagai daerah, yang pada dasarnya berupa konflik keagamaan. Kemudian berpadu dengan konflik-konflik sosial, ekonomi, dan politik yang didukung dengan banyaknya bermunculan organisasi-oraganisasi sosial sebagai simbol lahirnya *revivalisme* bangsa.

Akibat peristiwa tersebut, kondisi perpolitikan Garut menjadi kacau dan pemerintah dianggap gagal. Wedana Leles, yaitu R. Soerianatamihardja diberhentikan, sementara Bupati R.A.A Soeria Kertalegawa tetap dipertahankan meskipun Komisaris Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Arab, Dr.G.A.J Hazeu di akhir laporannya mengajukan saran agar bupati Garut diberhentikan dengan hormat (Chusnul Hajati, 1990, 84).

C. Kondisi Sosial-Budaya

Berdasarkan kebangsaan, penduduk garut dibedakan kedalam *tiga* kelompok, yaitu Pribumi, Eropa dan Timur Jauh yang tersebar di berbagai daerah (Sulaeman Anggapraja, 1984; 202).

1) Penduduk Pribumi

Penduduk Pribumi yaitu, orang Garut dan sekitarnya atau penduduk Indonesia (sekarang) yang mempunyai kedudukan paling rendah dalam masyarakat Hindia Belanda. Penduduk Pribumi dibedakan atas *dua* golongan; yaitu golongan *menak* (atas) dan golongan *somah* (bawah). Jumlah penduduk Garut tahun 1915 adalah 510.000 jiwa. Paling banyak penduduk dari jumlah keseluruhan adalah Pribumi (99,7%), Eropa dan Timur Jauh (0,3%).

Penduduk Pribumi, selain menempati posisi paling rendah dalam stratifikasi sosial pada saat itu, juga sangat sulit untuk sekedar mendapatkan pendidikan, kecuali beberapa golongan *menak*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat rakyat pribumi bodoh dan kedudukan orang Belanda tidak terancam.

2) Penduduk Eropa

Bangsa Eropa menempati posisi paling tinggi dalam stratifikasi sosial. Mereka adalah pejabat pemerintah, para pengusaha, dan anggota keluarga lainnya yang menetap di Hindia Belanda dalam kurun waktu yang cukup lama dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi.

Meskipun penduduk Eropa di Garut merupakan kaum minoritas, akan tetapi mereka mampu menguasai golongan mayoritas bahkan mengeksploitasinya. Bahkan mereka senantiasa

mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pemerintah.

3) Penduduk Timur Jauh

Penduduk Timur Jauh terdiri dari bangsa China, Jepang dan Timur Tengah yang kerap dipanggil orang Arab. Mereka bernasib baik di Hindia Belanda, karena penduduk Timur Jauh ini kedudukannya setingkat lebih tinggi dibandingkan penduduk Pribumi. Mereka datang ke Indonesia dan menetap untuk berdagang, serta menyebarkan Islam bagi orang Arab. Penduduk Timur Jauh paling banyak berasal dari negeri China yang memiliki jiwa dagang dan berkepribadian tegas, sehingga dengan mudah menguasai perdagangan Nusantara. Mereka diberi hak istimewa oleh pemerintah Hindia Belanda dalam memonopoli perdagangan di berbagai sektor.

Orang Arab pun tidak kalah penting, bahkan mereka memiliki nilai plus dalam perdagangan, karena ikatan keagamaan yang kuat, sehingga mereka lebih mendapat simpatik dari rakyat, bahkan ada diantaranya melakukan pernikahan dengan penduduk setempat.

D. Kondisi Ekonomi

Kehidupan rakyat pda umumnya di Priangan dapat dikatakan baik sekali, dengan basis perekonomian yang bersifat agraris. Penduduk desa sebagian besar adalah petani, baik sebagai pemilik tanah maupun buruh tani.

Pola penanaman yang utama adalah tanaman padi yang diusahakan di sawah, yang dapat dipanen *tiga kali* dalam waktu *dua* tahun. Namun untuk daerah lereng pegunungan yang kering, para petani biasanya mengusahakan tanahnya dengan tanaman palawija, seperti singkong, kacang tanah, kentang, cabai, jagung, dan kedelai. Dari tanaman singkong, biasanya dibuat tepung tapioka yang dijual ke Batavia, Eropa, dan Singapura. Adapun hasil bumi yang terkenal di Garut adalah jeruk dan vanili (Chusnul Hajati, 1990, Op.Cit, hal. 27).

Pasca Perang Dunia I, perekonomian dunia mengalami krisis, sehingga harga terus memuncak dan ketika terjadi gagal panen akibat kemarau panjang (1911-12), dan terjadi kembali (1918-1919) mengakibatkan kelangkaan beras, lumbung-lumbung desa ditutup. Kemudian untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Garut mengeluarkan kebijakan menjual wajib padi kepada pemerintah dengan ketentuan; bagi petani yang memiliki sawah seluas *lima bau* atau lebih diwajibkan menjual padinya sebanyak *empat* pikul dari tiap bau, hanya bagi petani yang memiliki tanah kurang dari setengah bau, dibebaskan dari kewajiban menjual padi. Akan tetapi kebijakan ini bukannya meringankan, sebaliknya justru mempersulit rakyat. Pada saat itu tidak ada beras yang dijual secara bebas, tapi rakyat harus membeli beras ke Kabupaten yang di jual oleh Bupati, dan ketersediaan beras juga tidak selamanya ada.

Sebenarnya ada beberapa jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian tersebut, diantaranya dengan mendirikan lembaga perkreditan rakyat, seperti; Bank Daerah, Lumbung Desa, dan Bank Desa, akan tetapi usaha itu tidak dirasa cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bank Daerah pertama didirikan di Garut tahun 1898 dengan tujuan untuk menyediakan modal uang bagi lembaga-lembaga perkreditan desa, kredit bagi yang mau membuka usaha, investasi dan membentuk modal, serta menyimpan kekayaan lumbung desa berupa asuransi dan dana perusahaan.

Lumbung Desa didirikan dengan tujuan untuk memberi kredit yang berupa bahan pangan penduduk desa saat paceklik. Lumbung ini dinamakan dengan nama "Lumbung Miskin" atau "Lumbung Jakat". Pada tahun 1917, lumbung des di Garut ditutup karena mengalami kemunduran, selain disebabkan oleh pengurusnya yang tidak mumpuni, pelaksanaannya juga sukar, antara lain mengenai pengangkutan padi memerlukan biaya dan tenaga sendiri (Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, No. 8. , 1976; 85).

Bank Desa pada awal mulanya berjalan lancar dan kehadirannya menjadi salah satu faktor mundurnya lumbung desa. Akan tetapi tidak lama kemudian mengalami kemunduran yang diakibatkan para kepala desa yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab malah berkhianat. Mereka menyalahgunakan uang bank untuk kepentingan pribadinya (Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, No. 8. , 1976; 86).

Meskipun sudah ada perkreditan rakyat, akan tetapi tidak mampu menolong saat terjadi bencana kekeringan dan gagal panen, serta krisis global yang mengakibatkan kondisi perekonomian rakyat semakin carut-marut.

E. Kondisi Keagamaan

Sebagian besar penduduk pribumi adalah beragama Islam. Penyebar Islam di Garut adalah beberapa tokoh inti, yang kemudian diteruskan oleh para pemuka agama, seperti kyai dan haji dikalangan masyarakat pribumi. Islamisasi tidak dilakukan dengan cara ekspansi, maupun jalan keras lainnya, akan tetapi Islam hadir dengan cara damai. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat pribumi, yang pada saat itu jelas notabene kepercayaan pribumi adalah menganut kepercayaan nenek moyang yang kental dengan budaya setempat. Faktor lain adalah kedatangan Islam juga dibawakan oleh orang-orang India, yang secara budaya dalam beberapa hal memiliki kemiripan (Hindu-Budha) dengan budaya dan kepercayaan setempat (pengenalan agama dengan tidak langsung kontradiktif jalan keras dengan budaya setempat).

Kyai dan haji merupakan elit keagamaan dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab tinggi. Elit keagamaan ini dibagi menjadi dua kelompok; *pertama* adalah ulama bebas, yaitu ulama tidak masuk dalam struktur birokrasi pemerintahan kolonial. Ulama ini yang kemudian sangat berperan dan lebih bisa diterima oleh masyarakat pribumi karena caranya yang membaur. *Kedua* adalah ulama yang masuk kedalam birokrasi pemerintahan kolonial dan memiliki jabatan tertentu. Ulama ini membentuk kelompok tersendiri dan menjauh dari masyarakat pribumi. Ulama ini yang disebut juga dengan nama *Penghulu*.

Ulama-ulama bebas merupakan ulama yang secara keilmuan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Kebanyakan mereka merupakan ulama-ulama yang ketika menimba ilmunya dari pesantren-pesantren. Mereka diberi *besluit* sebagai bentuk legalitas dalam dakwahnya, asalkan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Salah satunya adalah pembatasan penerjemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memaparkan arti perjuangan, dan hanya boleh diajarkan ayat-ayat mengenai akherat saja. Akan tetapi banyak ulama bebas yang menentang aturan itu, sehingga kemudian ruang geraknya mulai dipersempit. Akibat perlawanan atas aturan yang sudah diterapkan tersebut, banyak lahir perlawanan atas penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, seperti pada tahun 1893 di Garut terjadi peristiwa yang menggemparkan, terutama di Kota Garut. Waktu itu di pesantren-pesantren diajarkan ilmu tarekat Naksabandiyah, tokohnya adalah Kyai Moh. Roji dari Pesantren Dayeuhpandan dan Kyai Ahmad Jayadi dari Sanding, K.H Mustofa (Penghulu Bandung) juga tetap melakukannya.

KESIMPULAN

Garut merupakan wilayah Priangan Timur (Oost-Priangan), pengganti dari kabupaten Limbangan yang berdiri sekitar bulan Juli 1913, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal, No. 60, tertanggal 7 Mei 1913. Luas wilayah Garut adalah 3.065 km² yang dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yaitu; 3 kontrolir, 9 distrik, dan 29 onderdistrik. Kota garut pada masa itu meliputi 3 desa; yaitu Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Magarwati, sedangkan Kabupaten Garut meliputi distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk.

Pada masa kepemimpinan Bupati R.A.A Soeria Kertalegawa, Garut mengalami kejayaan terutama dalam bidang pariwisata. Akan tetapi pada masa ini pula Garut mengalami masa-masa sulit, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik, seperti peristiwa Cimareme. Kemudian hal lain adalah banyaknya bermunculan organisasi-organisasi, seperti SI (Syarekat Islam) misalnya.

Dalam struktur pemerintahan, bupati menduduki posisi paling tinggi, dengan tugas sebagai ketua dan juga anggota Dewan Komite yang memberi keputusan daerah, memimpin pemerintahan dan kepolisian. Bupati membawahi Patih, Wedana, Asisten Wedana, dan Kepala Desa.

Pada tahun 1917, jumlah penduduk Garut mencapai 510.000 jiwa. Terdiri atas 508.280 penduduk pribumi, 740 penduduk Eropa, dan 980 penduduk Timur Jauh. Struktur penduduk Garut, dibedakan atas *dua* golongan besar; bangsawan dan rakyat jelata atau menak atau somah, sedangkan berdasarkan kepemilikan tanah di pedesaan penduduk dikelompokkan kedalam *tiga* golongan, yaitu; asli, pendatang dan orang numpang.

Dalam bidang ekonomi, pada masa awal kepemimpinan R.A.A Soeria Kertalegawa mengalami kegoyahan, karena kemarau yang panjang dan krisis global akibat Perang Dunia I, sehingga kebutuhan pokok melonjak sedangkan penghasilan rakyat tetap bahkan menurun.

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, termasuk di Garut. Akan tetapi dalam eksistensinya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan Hindia Belanda. Pemerintah sendiri tidak memiliki kebebasan lebih dalam mengeluarkan kebijakan tanpa ada persetujuan dari pemerintah pusat (Pemerintah Hindia Belanda).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Dudung. (1999). Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos.
- Anggapraja, R. Sulaeman. (1997). Sejarah Garut dari Masa ke Masa. Garut.
- Ekadjati, Edi S. (1984). Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya, Jakarta: Girimukti Pustaka.
- Gottschlak, Lois. (1983). Mengerti Sejarah. Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press.
- Hajati, Chusnul. (1990). Peristiwa Cimareme tahun 1919; Perlawanan H. Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kartodirjo, Sartono. (1993). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kosim, E. (1984). Metode Sejarah; Asas dan Proses. Bandung; UNPAD. Fak. Sastra. Jurusan Sejarah.
- Pemerintahan Jawa Barat. (1991). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Putra, Reiza D. (2006). Sejarah Lisan; Konsep dan Metode. Bandung: Mirror Books.
- Soekanto, Soerjono. (1999). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyanto, Kunto. (2001). Garoet Kota Intan; Sejarah Lokal Kota Garut Sejak Zaman Kolonial Belanda Hingga masa Kemerdekaan, Bandung: Alqoprint Jatinangor.
- Suminto, H. Aqib. (1985). Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta; LP3ES.
- _____. Padjadjaran, 1 Maret 1919 dan 21 Pebruari 1920
- _____. Conduitestaat van R.A.A Soeria Kertalegawa G.S Regnt van Garoet over jaar 1917, 1918, 1924, 1926, 1928. ANRI
- _____. Sorat Asal-oesoel dari R.A.A Soeria Kertalegawa, Wedan Singaparna.Tt
- _____. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch Indie, 1915-1929
- _____. Memori Serah jabatan 1921-1930 (Jawa Barat).
- _____. Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, No.8. Jakarta;ANRI, 1975
- _____. Staatsblad van Nederlandsch-Indie